

**NEXUS ANTARA BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
INKLUSIF DI MASA PANDEMI COVID-19**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada  
Program Studi Magister Akuntansi**



**Disusun Oleh:**

**Herlina Aria Chandra**

**122100790**

**MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**NEXUS ANTARA BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
INKLUSIF DI MASA PANDEMI COVID-19**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada  
Program Studi Magister Akuntansi**



**Disusun Oleh:**

**Herlina Aria Chandra**

**122100790**

**MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA  
2023**

## UJIAN TESIS

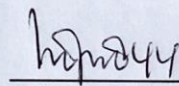
Tesis berjudul:

NEXUS ANTARA BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI MASA PENDEMI  
COVID-19

Telah diuji pada tanggal: 6 Juli 2023

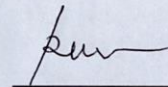
Tim Penguji:

Ketua



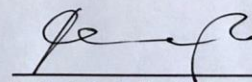
Dr. Haryono Subiyakto, M.Si.

Anggota



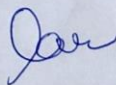
Dr. Rusmawan Wahyu Anggoro, M.S.A., Ak., CA.

Pembimbing 1



Dr. Rudy Badrudin, M.Si

Pembimbing 2



Prof. Dr. Baldrice Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.

**NEXUS ANTARA BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI MASA  
PENDEMI COVID-19**

dipersiapkan dan disusun oleh:

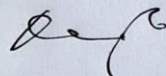
**Herlina Aria Chandra**

Nomor Mahasiswa: 122100790

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal: 6 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) di bidang Akuntansi

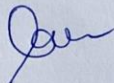
**SUSUNAN TIM PENGUJI**

Pembimbing 1

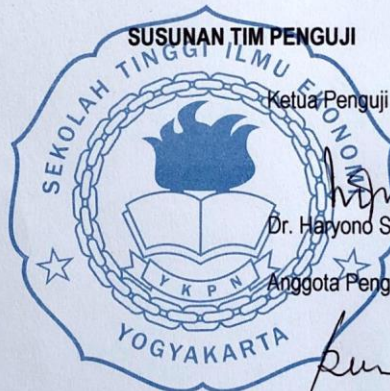


Dr. Rudy Badrudin, M.Si

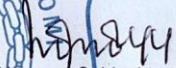
Pembimbing 2



Prof. Dr. Baldrick Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.

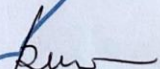


Ketua Penguji



Dr. Haryono Subiyakto, M.Si.

Anggota Penguji



Dr. Rusmawan Wahyu Anggoro, M.S.A., Ak., CA.

Yogyakarta, 6 Juli 2023  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Ketua,



Dr. Wisnu Prajogo, MBA.





**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA  
JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010  
TELP. (0274) 486160, 486321, FAKS. (0274) 486155 www.stieykpn.ac.id

## Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul:

### **NEXUS ANTARA BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI MASA PENDEMI COVID-19**

diajukan untuk diuji pada tanggal 6 Juli 2023, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijasah yang diberikan oleh Program Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

Saksi 1, sebagai Ketua Tim Penguji

Dr. Haryono Subiyakto, M.Si.

Saksi 2, sebagai Anggota Penguji

Dr. Rusmawan Wahyu Anggoro, M.S.A., Ak., CA.

Saksi 3, sebagai Pembimbing 1

Dr. Rudy Badrudin, M.Si

Yogyakarta, 6 Juli 2023

Yang memberi pernyataan

Herlina Aria Chandra

Saksi 4, sebagai Pembimbing 2

Prof. Dr. Baldrice Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.

Saksi 5, sebagai Ketua STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## NEXUS ANTARA BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI MASA PANDEMI COVID-19

Herlina Aria Chandra<sup>1</sup>

Rudy Badrudin<sup>2\*</sup>

Baldric Siregar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Graduate Program, Master of Accountancy, <sup>2,3</sup>Department of Doctor of Accountancy

<sup>1,2,3</sup>YKPN School of Business (STIE YKPN), Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author; e-mail: rudybadrudin.stieykpn@gmail.com

### ABSTRACT

*Regional economic development can lead to an increase in economic growth, a reduction in unemployment and inequality, as well as a decrease in poverty levels in the area. However, the presence of the Covid-19 pandemic has resulted in a decline in economic activities, thereby increasing unemployment and poverty in Indonesia. This study aims to analyze the influence of Regional Original Revenue (ROR) and General Allocation Fund (GAF) on capital expenditure and economic growth, with the Covid-19 pandemic as a moderating variable in all districts and cities throughout Indonesia from 2019 to 2022. The sample used consists of 341 districts and cities that have complete data on the required variables. The data used are secondary data derived from the Regional Budget (APBD) for ROR, GAF, and capital expenditure. Meanwhile, data on economic growth, unemployment, and poverty are obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). The analytical techniques employed include path analysis, descriptive analysis, model fit test, and multicollinearity test. The research findings indicate that ROR and GAF have a significant positive effect on capital expenditure. Capital expenditure is able to mediate the relationship between ROR, GAF, and economic growth. However, economic growth is unable to mediate the relationship between capital expenditure and unemployment or poverty. Covid-19 is found to negatively moderate the relationship between capital expenditure and unemployment, while positively moderating the relationship between capital expenditure and poverty.*

**Keywords:** regional original revenue, general allocation fund, capital expenditure, inclusive economic growth, covid-19

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi inklusif menurut *United Nations Development Program (UNDP)* atau Program Pembangunan PBB adalah pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan semua anggota masyarakat. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi inklusif mencakup pengurangan kemiskinan, kesenjangan, dan pemenuhan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Salah satu upaya guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang melibatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, dan peningkatan infrastruktur ekonomi tepat digunakan sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Apabila pembangunan ekonomi daerah terbentuk maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan ketimpangan, serta penurunan tingkat kemiskinan di daerah. Selain itu, pembangunan ekonomi ini juga ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi, seperti peningkatan produktivitas dan penghasilan per kapita penduduk, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan pendapatan dan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD. Peran pemerintah daerah semakin penting untuk melakukan pembangunan ekonomi semenjak adanya desentralisasi fiskal di mana prioritas pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk kepentingan produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi melalui belanja modal akan menyebabkan perekonomian menjadi tumbuh sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. PAD dan DAU adalah dua komponen di APBD yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal. Belanja modal dilakukan berdasarkan pada keperluan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk peningkatan fasilitas publik (Priambudi, 2017). Alokasi belanja modal ini harus lebih banyak dimanfaatkan untuk hal produktif sehingga meningkatkan pembangunan ekonomi.

PAD merupakan sumber pendanaan daerah otonom yang diperoleh dari kemampuan sumber daya di wilayah itu sendiri (Azzahra et al., 2023). Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh potensi setiap daerah. Pendapatan ini tentunya akan berbeda di setiap daerah akibat adanya perbedaan kemampuan sumber daya di setiap daerah. Hal ini dapat menyebabkan adanya kesenjangan fiskal (kesenjangan antara kebutuhan fiskal dan kemampuan daerah) sehingga diperlukan adanya pendapatan lain diluar Pendapatan Asli Daerah ini. Salah satu sumber dana tambahan yang dapat dipergunakan untuk mendanai belanja modal adalah DAU. DAU ini dialokasikan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna mendukung pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Harahap et al., 2019). Pengalokasian DAU diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004, di mana mempertimbangkan kesenjangan fiskal suatu daerah, potensi wilayah, luas wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk, dan tingkat penghasilan masyarakat di setiap daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan antara daerah yang maju dan yang sedang berkembang.

Pendapatan dan belanja daerah dapat menjadi salah satu komponen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan belanja modal yang dibelanjakan untuk kepentingan produktif. Tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengalokasian ini juga dapat mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Pada masa pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya guna mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah Indonesia (Fadhilah et al., 2023).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami pelemahan sebesar 2,97% bahkan mencapai angka -5,32% pada kuartal kedua. Kontraksi ekonomi ini dipicu adanya faktor eksternal Covid-19. Tidak hanya secara nasional, dampak Covid-19 pasti juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Kontraksi ekonomi paling dirasakan oleh daerah yang mengandalkan sektor pariwisata akibat adanya *social distancing*, seperti kabupaten/kota yang terletak di Provinsi Bali dan Yogyakarta. Berdasarkan *google mobility*, tingkat mobilitas di pusat transportasi umum Provinsi Bali menurun sampai 95% pada Maret 2020 sedangkan di Yogyakarta menurun 84% pada Mei 2020. Hal ini berdampak pada penurunan ekonomi di Bali sebesar 9,31% dan 2,69% di Yogyakarta.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Covid-19 juga menimbulkan penambahan angka pengangguran, penurunan tingkat produktivitas baik pada individu hingga perusahaan, serta mengakibatkan timbulnya kelompok masyarakat miskin baru, yang secara keseluruhan meningkatkan jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin hingga meningkatnya angka kematian. Pada bulan September 2019, persentase penduduk miskin sebanyak 9,22%, tetapi meningkat menjadi 9,78% pada Maret 2020 sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Hal ini setara dengan bertambahnya 1,63 juta penduduk miskin sejak September 2017. Selain itu, Covid-19 juga berdampak pada pengangguran yang meningkat di Indonesia di mana terjadi penurunan penghasilan buruh/karyawan/pegawai sebesar 15,6%. Selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran dari 2,67 juta orang pada bulan Agustus 2020 menjadi 9,77 juta orang. Dari jumlah tersebut, 1,77 juta orang merupakan mereka yang kehilangan pekerjaan akibat dampak dari Covid-19 dan 24,03 juta orang lainnya mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (Goma, 2021). Bahkan Covid-19 juga meningkatkan angka kriminalitas dan kematian di Indonesia.

Dampak dari adanya Covid-19 ini juga memengaruhi kemiskinan di daerah, diantaranya daerah yang berada di pulau Jawa-Bali. Kasus Covid-19 yang 70-80% berada di Jawa-Bali mengakibatkan adanya simpul kemiskinan baru akibat perekonomian kabupaten/kota yang terdampak. Tercatat pada periode Maret-September 2020 peningkatan kemiskinan tertinggi berada di Kepulauan Seribu yakni 2,07% dan pada tahun 2021 peningkatan kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Sampang yakni 3,05%. Sementara di Bali, Kabupaten Buleleng menjadi daerah dengan peningkatan kemiskinan tertinggi yakni 0,93%. Adanya peningkatan angka kemiskinan ini juga dipicu adanya PHK dan pengurangan gaji saat pandemi.

Pemerintah dituntut untuk menanggapi adanya Covid ini dengan cepat tanggap. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peranan penting menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan secara tepat dan menjangkau seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan mendorong konsumsi dalam negeri dan aktivitas usaha serta terjaganya stabilitas ekonomi. Peningkatan konsumsi dalam negeri didorong dengan pemberian pembebasan biaya listrik, Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Langsung Tunai. Kemudian untuk meningkatkan aktivitas pelaku UMKM dan korporasi pemerintah memberikan stimulus seperti penundaan angsuran dan subsidi bunga, jaminan modal kerja hingga Rp10 miliar, serta insentif pajak. Sementara itu, untuk menjaga stabilitas nasional, Bank Indonesia melakukan berbagai cara antara lain menurunkan suku bunga, mempertahankan nilai rupiah, membeli Surat Berharga Negara, serta stabilitas makro ekonomi dan stabilitas keuangan.

Pada kuartal IV tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pada 5,01% di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 tercatat lebih tinggi yakni 5,31% daripada tahun 2021 yakni 3,70%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah dipimpin oleh Maluku Utara di mana mampu tumbuh sebesar 22,94% di tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa strategi pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah membuahkan hasil. Upaya yang dilakukan pemerintah berhasil mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga ini bagi pemerintah akan menambah alokasi belanja modal. Dorongan pemerintah terhadap belanja modal ini mampu membuat perekonomian



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Indonesia yang pada awal masa pandemi Covid-19 mengalami kontraksi kini berangsur membaik.

Selain pertumbuhan ekonomi yang membaik, penanggulangan Covid-19 juga berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Pada Maret 2022, angka penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk. Sementara itu, angka pengangguran menurun menjadi 6,49% dari jumlah angkatan kerja atau setara dengan 9,10 juta orang pada Agustus 2021. Ini berarti, dorongan pemerintah terhadap belanja modal selain memengaruhi pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung juga menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian yang dijalankan oleh Haryanto & Suprianto (2022), Setiyawati & Hamzah (2007) dan Mawarni *et al.* (2013) menyimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Ini berarti PAD menjadi hal yang perlu diperhatikan pengalokasiannya karena terbukti berkontribusi untuk penganggaran belanja modal. Penelitian lain yang mencoba menjabarkan korelasi antara PAD dan belanja modal ialah penelitian yang dilakukan oleh Lisandri *et al.* (2017) memperoleh hasil bahwa PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Azzahra *et al.* (2023) memperoleh hasil bahwa PAD memiliki pengaruh negatif terhadap belanja modal.

Azzahra *et al.* (2023) dan Priambudi (2017) menemukan bahwa DAU memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian lain oleh Lisandri *et al.* (2017) dan Salama (2018) memperoleh hasil bahwa DAU memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah dalam menggunakan DAU dialokasikan untuk pembangunan daerah yang tertuang dalam alokasi belanja modal. Penelitian lain yang mencoba menjabarkan hubungan antara DAU dan belanja modal adalah riset yang dilakukan Maheni & Maryono (2021) yang menemukan bahwa DAU tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan riset sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Lisandri *et al.* (2017) dan Siswiyanti (2017), ditemukan bahwa belanja modal berperan sebagai variabel intervening atau mediasi yang signifikan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi. Namun, Azzahra *et al.* (2023) menunjukkan hasil yang tidak sama, di mana belanja modal tidak memiliki peran mediasi hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Irvan & Karmini (2016) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa PAD tidak mempunyai hubungan tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi lewat belanja modal.

Lisandri *et al.* (2017) dalam risetnya juga menemukan bahwa belanja modal memiliki peran signifikan dalam memediasi hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut juga didukung oleh Maheni & Maryono (2021) yang menemukan bahwa DAU memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Namun, riset lain yang dilakukan oleh Azzahra *et al.* (2023) menyimpulkan bahwa belanja modal tidak memiliki efek mediasi yang signifikan dalam hubungan antara DAU dengan pertumbuhan ekonomi.

Riset *gap* yang membedakan riset ini dengan riset sebelumnya terdapat pada objek penelitian, variabel mediasi dan moderasi yang digunakan. Riset ini melibatkan semua

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kabupaten/kota di Indonesia sebagai objek penelitian, sementara penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada kabupaten/kota di satu wilayah provinsi atau pulau tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di riset ini digunakan sebagai variabel mediasi antara belanja modal dengan pengangguran dan kemiskinan. Sementara itu, penelitian sebelumnya belum memanfaatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara belanja modal, pengangguran, dan kemiskinan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan Pandemi Covid-19 sebagai variabel pemoderasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dan kemiskinan. Di mana Pandemi Covid-19 pada riset-riset sebelumnya belum ada yang menjadikan sebagai variabel moderasi di antara kedua variabel tersebut. Penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan Covid-19 sebagai moderasi antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti pengaruh langsung Covid-19 terhadap kemiskinan dan pengangguran atau pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak menjadikan Pandemi Covid-19 sebagai data kategori untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi.

## LANDASAN TEORI

### Teori Agensi

Teori agensi dikemukakan pertama kali oleh (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menguraikan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal mempercayakan organisasinya untuk dikelola oleh agen. Masyarakat yang dapat dikatakan sebagai prinsipal memerlukan pertanggungjawaban dari pemerintah ketika mengelola organisasinya karena adanya asimetri informasi diantara keduanya. Realisasi APBN dan APBD yang dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan sehingga masyarakat dapat menilai bahwa organisasinya dalam hal ini daerah dikelola dengan baik atau tidak.

### Pendapatan Asli Daerah

PAD merujuk pada UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam APBD, PAD memiliki empat pos yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD dapat dijadikan sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Apabila suatu daerah mengalami kenaikan PAD maka besar kemungkinan daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif.

### Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah bagian dari dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat untuk mendukung desentralisasi fiskal, bersama dengan DBH dan DAK. DAU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan untuk mengatasi kesenjangan keuangan antardaerah guna membiayai kebutuhan daerah. Pengalokasian DAU diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004, yang mempertimbangkan kesenjangan fiskal, potensi wilayah, luas wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan penduduk di daerah tersebut, sehingga perbedaan antara daerah maju dan berkembang dapat dikurangi. Jika suatu daerah memiliki kebutuhan fiskal yang kecil tetapi memiliki potensi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka anggaran DAU yang diberikan akan relatif kecil. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki kebutuhan fiskal yang besar tetapi potensi

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

fiskal dan pertumbuhannya ekonominya rendah, maka alokasi DAU yang diberikan akan relatif besar.

## **Belanja Modal**

Belanja modal adalah salah satu komponen belanja langsung yang terdapat dalam APBD di mana memiliki manfaat jangka panjang dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Anggaran belanja modal dapat berasal dari PAD dan DAU. Belanja modal memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jadi pemerintah daerah perlu mengupayakan peningkatan belanja pembangunan termasuk di dalamnya terdapat belanja modal (Badrudin, 2017). Teori pengeluaran pemerintah menguraikan bahwa pengeluaran agregat dapat ditingkatkan melalui belanja pemerintah untuk kegiatan pembangunan sehingga dapat memicu peningkatan kegiatan ekonomi negara termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi daerah (Sukirno, 2006). Apabila dihubungkan dengan pembelanjaan modal, semakin tinggi belanja modal maka semakin besar dampaknya terhadap perekonomian daerah (Darise, 2006).

## **Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Pertumbuhan ekonomi inklusif menurut *United Nations Development Program* (UNDP) atau Program Pembangunan PBB adalah pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan semua anggota masyarakat. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi inklusif mencakup pengurangan kemiskinan, kesenjangan, dan pemenuhan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan yang termasuk elemen penting yang menjadi perhatian dalam pertumbuhan ekonomi inklusif.

## **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan pendapatan ataupun kemampuan yang diakibatkan oleh adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi penting bagi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai menggunakan laju pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) pada lingkup nasional dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada lingkup kewilayahan atau daerah. PDB atau PDRB ini sendiri merupakan nilai yang timbul karena produksi barang dan jasa di suatu wilayah pada periode tertentu.

Teori pertumbuhan ekonomi yang relevan dengan penelitian ini adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut teori Neo Keynes yang dipopulerkan oleh Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar yang menyimpulkan bahwa penanaman modal dan investasi merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi mengakibatkan tersedianya modal untuk meningkatkan produksi. Apabila terjadi peningkatan produksi maka terjadi pula peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal sangat penting dilakukan karena pembentukan modal yang tepat akan meningkatkan produksi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## **Pengangguran**

Pengangguran menurut Badan Pusat Statistik merujuk kepada individu yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, tidak mencari peluang kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, atau individu yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Pengangguran digambarkan dengan



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*indicator* tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran dapat digunakan untuk menganalisis perekonomian suatu negara atau daerah apakah mengalami perkembangan, perlambatan, atau penurunan. Selain itu, juga dapat memberikan gambaran mengenai ketimpangan dan kesenjangan distribusi pendapatan di suatu negara atau daerah (Najib Putri & Yuliana, 2023).

## **Kemiskinan**

Kemiskinan dapat diukur dari segi pengeluaran, di mana seseorang secara ekonomi tidak mampu menyukupi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Menurut BPS seseorang dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) menggambarkan nilai minimum pengeluaran yang dibutuhkan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, termasuk kebutuhan makanan dan non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Kemiskinan digambarkan dengan *indicator* rasio penduduk miskin.

## **Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 merupakan bencana penyebaran penyakit akibat virus SARS-CoV-2 di seluruh dunia dan sulit untuk dikendalikan, termasuk di Indonesia. Pandemi menyebabkan perubahan tatanan kehidupan, salah satunya adalah pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dalam menghadapinya pemerintah maupun masyarakat perlu melakukan strategi yang mampu beradaptasi dalam beberapa pola kehidupan yang baru dan dalam kondisi Covid-19 yang tidak pasti (Fadhilah *et al.*, 2023).

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal**

PAD berfungsi penentu kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan baik fungsi publik ataupun pembangunan. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka semakin mandiri pula daerah tersebut dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Riset yang dilakukan oleh Haryanto & Suprianto (2022), Setiyawati & Hamzah (2007) dan Mawarni *et al.* (2013) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Artinya PAD menjadi hal yang perlu diperhatikan pengalokasiannya karena berkontribusi untuk penganggaran belanja modal. Dengan semakin banyaknya alokasi PAD ke belanja modal maka daerah tersebut akan semakin mandiri dan produktif.

**H1: PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten/kota se-Indonesia**

### **Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal**

Pemerintah daerah memanfaatkan DAU guna mendanai berbagai belanja, termasuk belanja modal jika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk membiayai belanja modal. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azzahra *et al.* (2023) dan Priambudi (2017) menemukan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Riset lain oleh Lisandri *et al.* (2017) dan Salama (2018) memperoleh hasil bahwa DAU memiliki pengaruh terhadap belanja modal. DAU memiliki pengaruh terhadap belanja modal karena dialokasikan untuk pembangunan daerah yang tertuang dalam alokasi belanja modal.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**H2: DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten/kota se-Indonesia**

## **Pengaruh Belanja Modal dalam Memediasi Hubungan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Proporsi anggaran dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah menggunakan anggarannya guna menjalankan fungsi-fungsi yang dianggap produktif dan fungsi-fungsi yang kurang produktif dalam pembangunan ekonomi. Bahkan ketentuan minimal pun diatur dalam kaitannya dengan pendidikan, kesehatan dan belanja modal (B. Siregar, 2019). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lisandri *et al.* (2017) memperoleh hasil bahwa belanja modal memiliki peran mediasi hubungan antara PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin banyaknya anggaran belanja modal dari PAD maka infrastruktur yang mendukung kegiatan produktif masyarakat akan meningkat kualitasnya. Apabila infrastruktur mendukung maka kegiatan produktif masyarakat akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

**H3a: Belanja modal mampu memediasi pengaruh antara PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se-Indonesia**

## **Pengaruh Belanja Modal dalam Memediasi Hubungan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara tidak langsung melalui pendanaan belanja modal. Peningkatan infrastruktur akibat pembelanjaan modal akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lisandri *et al.* (2017) dan Maheni & Maryono (2021) memperoleh hasil bahwa belanja modal memiliki peran mediasi hubungan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU yang ialah dana transfer pemerintah pusat yang apabila dialokasikan guna pembangunan daerah yang tertuang dalam alokasi belanja modal dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung.

**H3b: Belanja modal mampu memediasi pengaruh antara DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se-Indonesia**

## **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dalam Memediasi Hubungan Belanja Modal terhadap Pengangguran**

Tujuan dari belanja modal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan, termasuk di dalamnya adalah peningkatan belanja modal (Badrudin, 2017). Semakin tinggi belanja modal maka akan memiliki dampak semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi daerah meningkat maka dapat dikatakan pembangunan daerah terwujud. Hal ini dapat berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan pengurangan tingkat pengangguran di daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Putrayuda *et al.* (2017), Putri & Yuliana (2023) dan Azzahra *et al.* (2023) telah menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang memediasi pengaruh belanja modal terhadap pengangguran.

**H4a: Pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh antara belanja modal terhadap pengangguran di kabupaten/kota se-Indonesia**

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dalam Memediasi Hubungan Belanja Modal terhadap Kemiskinan**

Tujuan belanja modal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena digunakan untuk menambah aset atau investasi guna meningkatkan sarana dan prasarana publik. Semakin tinggi belanja modal maka akan memiliki dampak semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Putrayuda *et al.* (2017), Putri & Yuliana (2023) dan Azzahra *et al.* (2023) telah menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang memediasi pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan.

**H4b: Pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh antara belanja modal terhadap kemiskinan di kabupaten/kota se-Indonesia**

## **Pengaruh Pandemi Covid-19 dalam Memoderasi Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran**

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah akan menciptakan pembangunan ekonomi yang berdampak pada penurunan angka pengangguran di daerah. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi seharusnya mampu menekan tingkat pengangguran. Akan tetapi, akibat adanya Pandemi Covid-19 mengurangi bahkan menghentikan aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan pengangguran. Peningkatan angka pengangguran ini dikarenakan banyaknya PHK yang dilakukan perusahaan yang terancam atau bahkan sudah mengalami kebangkrutan. Penelitian yang dilakukan oleh Haryamto & Suprianto (2022) telah menggunakan Pandemi Covid-19 sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Pandemi Covid-19 sebagai variabel yang memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran.

**H5a: Pandemi Covid-19 mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di kabupaten/kota se-Indonesia**

## **Pengaruh Pandemi Covid-19 dalam Memoderasi Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan**

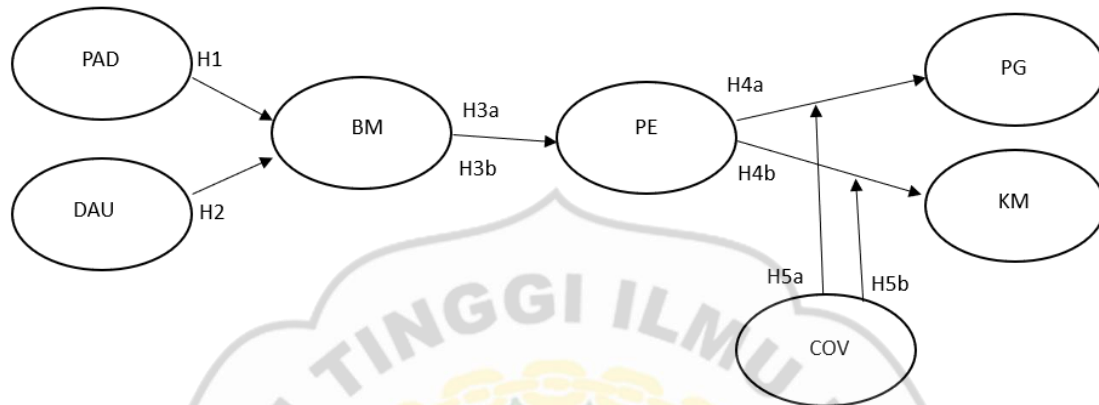
Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah akan menciptakan pembangunan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi yakni peningkatan produktivitas dan penghasilan per kapita penduduk sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik sehingga tingkat kemiskinan akan menurun. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, akibat adanya Pandemi Covid-19 mengurangi bahkan menghentikan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya angka kemiskinan. Hal ini terjadi akibat berkurangnya lapangan kerja dan bertambahnya orang yang menganggur. Penelitian yang dilakukan oleh Haryamto & Suprianto (2022) telah menggunakan Pandemi Covid-19 sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Pandemi Covid-19 sebagai variabel yang memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

**H5b: Pandemi Covid-19 mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota se-Indonesia**



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan penjelasan teori dan hipotesis yang sudah diuraikan di atas, dapat dibentuk kerangka konseptual sebagaimana terlihat di Gambar 2.1.



**Gambar 1**  
**Model Struktural**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten/kota di Indonesia sebagai objek penelitian dalam rentang waktu 2019-2022. Data PAD, DAU, dan belanja modal diperoleh dari APBD kabupaten/kota di Indonesia melalui situs web resmi [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id). Sementara itu, data mengenai pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran kabupaten/kota di Indonesia diperoleh melalui situs web resmi [bps.go.id](http://bps.go.id).

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 508 dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki data lengkap mengenai PAD, DAU, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara dikecualikan dari sampel karena adanya perbedaan struktur administratif di wilayah tersebut, di mana data hanya tersedia di tingkat provinsi dan tidak mencakup data kabupaten/kota yang memiliki DPRD seperti kabupaten/kota lainnya. Namun, dari 508 sampel sejumlah 167 sampel tidak memiliki data yang lengkap sehingga dikeluarkan dari sampel. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 341 sampel.

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji fit model, uji multikolinearitas, dan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan SEM (*Structural Equation Model*) yang menunjukkan adanya hubungan antarvariabel baik secara langsung (*direct effect*) maupun tidak langsung (*indirect effect*). Analisis hipotesis ini ditentukan dengan melihat tingkat signifikansi pada masing-masing koefisien jalur (*path coefficient*).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)*	1364	1,44	4835,19	245,133	412,648
Dana Alokasi Umum (DAU)*	1364	225,98	2149,82	653,629	290,641
Belanja Modal (BM)*	1364	18,79	1701,25	272,23	205,518
Pertumbuhan Ekonomi (PE) %	1364	-16,52	28,78	2,897	3,262
Pengangguran (PG) %	1364	0,12	15,92	5,076	2,505
Kemiskinan (KM) %	1364	1,78	34,83	10,691	5,847
Pandemi Covid-19 (COV)		0	1	0,5	0,5
Valid N(listwise)	1364				

Keterangan:\*) dalam miliar rupiah

Tabel di atas berisi ringkasan deskripsi variabel penelitian. Pengukuran berbagai variabel penelitian tersebut adalah: PAD(Pendapatan Asli Daerah)=Pendapatan Asli Daerah, DAU (Dana Alokasi Umum)=Dana Alokasi Umum, BM(belanja modal)=belanja modal, PE (pertumbuhan ekonomi)=PDRB, PG (pengangguran)=tingkat pengangguran terbuka, KM(kemiskinan)=rasio penduduk miskin, COV(Covid-19)=0 menunjukkan tidak ada Pandemi Covid-19 pada tahun 2019 dan 2022, 1 menunjukkan ada Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021.

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan hasil pengujian dalam tabel di atas, dapat diketahui nilai rata-rata, median, maksimum, minimum, standar deviasi, jumlah, dan jumlah observasi yang digunakan. Dapat diketahui jika jumlah observasi penelitian sebanyak 1364 sampel selama tahun 2019-2022. Nilai tertinggi PAD menunjukkan data sebesar Rp4835,19 miliar yang terealisasi dari APBD Kabupaten Badung tahun 2019. Nilai tersebut 1872,48% di atas rata-rata yang terealisasi sebelum Pandemi Covid-19. Sedangkan nilai terendah menunjukkan data sebesar Rp1,44 miliar, 99,41% di bawah rata-rata terealisasi dari APBD Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2022 yang mana realisasi tersebut terjadi saat setelah adanya Pandemi Covid-19. Kemudian untuk *mean* pada variabel PAD ini sebesar 245,133 yang berarti rata-rata PAD pada data tersebut adalah sebesar Rp245,133 miliar. Sementara itu standar deviasi keseluruhan nilai PAD sebesar 412,648 lebih tinggi dari nilai rata-rata yang berarti penyebaran data kurang merata.

Nilai tertinggi DAU menunjukkan data sebesar Rp2149,82 miliar yang terealisasi dari APBD Kabupaten Bandung tahun 2019. Nilai tersebut 228,91% di atas rata-rata yang terealisasi sebelum Pandemi Covid-19. Sedangkan nilai terendah menunjukkan data sebesar Rp225,98 miliar, 65,43% di bawah rata-rata terealisasi dari APBD Kota Bontang tahun 2021 yang mana realisasi tersebut terjadi saat adanya Pandemi Covid-19. Kemudian untuk *mean* pada variabel DAU ini sebesar 653,629 yang berarti rata-rata DAU pada data tersebut adalah sebesar Rp653,629 miliar. Sementara itu standar deviasi keseluruhan nilai DAU sebesar 290,641 lebih rendah dari nilai rata-rata yang berarti penyebaran data merata.

Nilai tertinggi belanja modal menunjukkan data sebesar Rp1701,25 miliar yang terealisasi dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2021. Nilai tersebut 524,93% di atas rata-

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

rata yang terealisasi saat Pandemi Covid-19. Sedangkan nilai terendah menunjukkan data sebesar Rp18,79 miliar, 93,10% di bawah rata-rata terealisasi dari APBD Kota Pematang Siantar tahun 2022 yang mana realisasi tersebut terjadi saat setelah adanya Pandemi Covid-19. Kemudian untuk *mean* pada variabel belanja modal ini sebesar 272,23 yang berarti rata-rata belanja modal pada data tersebut adalah sebesar Rp272,23 miliar. Sementara itu standar deviasi keseluruhan nilai belanja modal sebesar 205,518 lebih rendah dari nilai rata-rata yang berarti penyebaran data merata.

Nilai tertinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan data sebesar 28,78% yang terealisasi dari APBD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020. Nilai tersebut 8,93% di atas rata-rata yang terealisasi saat Pandemi Covid-19. Sedangkan nilai terendah menunjukkan data sebesar -16,52%, 6,70% di bawah rata-rata terealisasi dari APBD Kabupaten Badung tahun 2020 yang mana realisasi tersebut terjadi saat adanya Pandemi Covid-19. Kemudian untuk *mean* pada variabel pertumbuhan ekonomi ini sebesar 2,897 yang berarti rata-rata pertumbuhan ekonomi pada data tersebut adalah sebesar 2,897%. Sementara itu standar deviasi keseluruhan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,262 lebih tinggi dari nilai rata-rata yang berarti penyebaran data kurang merata.

Nilai tertinggi pengangguran menunjukkan data sebesar 15,92% yang terealisasi dari APBD Kota Makassar tahun 2020. Nilai tersebut 2,14% di atas rata-rata yang terealisasi saat adanya Pandemi Covid-19. Sedangkan nilai terendah menunjukkan data sebesar 0,12%, 0,98% di bawah rata-rata terealisasi dari APBD Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2022 yang mana realisasi tersebut terjadi saat setelah adanya Pandemi Covid-19. Kemudian untuk *mean* pada variabel pengangguran ini sebesar 5,076 yang berarti rata-rata pengangguran pada data tersebut adalah sebesar 5,076%. Sementara itu standar deviasi keseluruhan nilai pengangguran sebesar 2,505 lebih rendah dari nilai rata-rata yang berarti penyebaran data merata.

Nilai tertinggi kemiskinan menunjukkan data sebesar 34,83% yang terealisasi dari APBD Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2019. Nilai tersebut 2,26% di atas rata-rata yang terealisasi sebelum Pandemi Covid-19. Sedangkan nilai terendah menunjukkan data sebesar 1,78%, 0,83% di bawah rata-rata terealisasi dari APBD Kabupaten Badung Selatan tahun 2019 yang mana realisasi tersebut terjadi saat sebelum adanya Pandemi Covid-19. Kemudian untuk *mean* pada variabel kemiskinan ini sebesar 10,691 yang berarti rata-rata kemiskinan pada data tersebut adalah sebesar 10,691%. Sementara itu standar deviasi keseluruhan nilai kemiskinan sebesar 5,847 lebih rendah dari nilai rata-rata yang berarti penyebaran data merata.

## Uji Fit Model

**Tabel 2**  
**Tabel Model Fit SRMR**

Nama	<i>Saturated Model</i>
SRMS	0,000
NFI	0,000

Sumber: Olah data



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian ini memperoleh hasil SRMS sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,1. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model struktural dalam penelitian ini memenuhi persyaratan dan layak digunakan.

## Uji Multikolinearitas

**Tabel 3**  
**Tabel Statistik Kolineritas VIF**

Nama	Statistik Kolineritas VIF
PAD	1,000
DAU	1,000
BM	1,000
PE	1,000
PG	1,000
KM	1,000
COV	1,000

Sumber: Olah data

Pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di atas bahwa nilai VIF seluruh variabel adalah 1. Ini berarti tidak ada korelasi antara variabel independen atau tidak ada masalah multikolinearitas dalam model penelitian ini.

## Uji Hipotesis

**Tabel 4**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Jalur	Koefisien Jalur	T	Sig.	Prediksi	Temuan	Hipotesis Penelitian
H1	PAD→BM	0,485	11,759	0,000	Positif	Positif signifikan	Terdukung
H2	DAU→BM	0,246	6,153	0,000	Positif	Positif signifikan	Terdukung
H3a	PAD→BM→PE	0,045	3,115	0,002			Terdukung
H3b	DAU→BM→PE	0,023	2,721	0,007			Terdukung
H4a	BM→PE→PG	-0,001	0,275	0,784			Tidak Terdukung
H4b	BM→PE→KM	-0,010	1,539	0,124			Tidak Terdukung
H5a	COV*PE→PG	-0,087	2,399	0,016			Terdukung
H5b	COV*PE→KM	0,146	2,625	0,009			Terdukung

Tabel di atas berisi ringkasan hasil pengujian PAD dan DAU terhadap BM, mediasi BM pada hubungan PAD dan DAU dengan PE, mediasi PE pada hubungan BM dengan PG dan KM, serta moderasi COV pada hubungan PE dengan PG dan KM. Pengukuran berbagai variabel penelitian tersebut adalah: PAD(Pendapatan Asli Daerah)=Pendapatan Asli Daerah, DAU (Dana Alokasi Umum)=Dana Alokasi Umum, BM(belanja modal)=belanja modal, PE (pertumbuhan ekonomi)=PDRB, PG (pengangguran)=tingkat pengangguran terbuka, KM(kemiskinan)=rasio penduduk miskin, COV(Covid-19)=0 menunjukkan tidak ada Pandemi Covid-19 pada tahun 2019 dan 2022, 1 menunjukkan ada Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021.

Sumber: Olah data

## Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas ditemukan bahwa H1 terdukung. Terbukti dengan nilai signifikansi 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 dan memiliki koefisien jalur

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

0,485. Hal ini berarti bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto & Suprianto (2022), Setiyawati & Hamzah (2007) dan Mawarni *et al.* (2013) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Artinya PAD menjadi hal yang perlu diperhatikan pengalokasiannya karena terbukti berkontribusi untuk penganggaran belanja modal.

## **Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas H2 yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal terbukti terdukung di mana tingkat signifikansi pada hasil uji di atas adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien jalur sebesar 0,246. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azzahra *et al.* (2023) dan Priambudi (2017) menemukan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah dalam menggunakan DAU dialokasikan untuk pembangunan daerah yang tertuang dalam alokasi belanja modal.

## **Pengaruh Belanja Modal dalam Memediasi Hubungan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas ditemukan H3a pada penelitian ini juga terdukung dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa belanja modal (BM) mampu memediasi hubungan antara PAD dengan PE. Artinya, PAD yang dialokasikan kepada belanja modal terbukti mampu meningkatkan pelayanan publik. Hasil penelitian ini didukung oleh Lisandri *et al.* (2017) memperoleh hasil bahwa belanja modal memiliki peran mediasi hubungan antara PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini semakin memperkuat bahwa dengan alokasi PAD yang terdapat di belanja modal akan meningkatkan produktivitas karena membaiknya kualitas pelayanan publik sehingga berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

## **Pengaruh Belanja Modal dalam Memediasi Hubungan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas ditemukan bahwa H3b juga terdukung dalam penelitian ini dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa belanja modal (BM) mampu memediasi hubungan antara DAU dengan PE. Hasil penelitian ini didukung oleh Lisandri *et al.* (2017) dan Maheni & Maryono (2021) memperoleh hasil bahwa belanja modal memiliki peran mediasi hubungan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memperkuat bukti bahwa alokasi penggunaan DAU yang terdapat di belanja modal akan meningkatkan produktivitas karena membaiknya kualitas pelayanan publik sehingga berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

## **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dalam Memediasi Hubungan Belanja Modal terhadap Pengangguran**

H4a yang menyatakan PE mampu memediasi hubungan antara BM dengan PG memperoleh hasil yang bertolak belakang. H4a tidak terdukung karena memiliki tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,784 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa PE tidak mampu memediasi hubungan antara BM dengan PG. Ketidakmampuan PE dalam memediasi hubungan antara BM dengan PG dapat disebabkan oleh pengalokasian BM tidak serta merta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sarana dan prasarana saja. Belanja modal juga digunakan seperti untuk pengembangan sumber daya manusia dan modernisasi teknologi. Ketidakmampuan PE memediasi hubungan BM

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan PG juga dapat disebabkan karena peningkatan PE belum tentu memicu kegiatan produksi dan distribusi sehingga menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, BM yang dialokasikan ke PE belum tentu dapat mengurangi tingkat pengangguran. Peningkatan PE akibat alokasi BM mungkin lebih berpengaruh pada peningkatan aktivitas ekonomi lainnya, seperti konsumsi. Hal ini juga didukung adanya Covid-19 di mana pemerintah mengalihkan alokasi BM untuk menanggulangi dampak Covid-19 yang salah satunya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat (Fadhilah *et al.*, 2023).

## **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dalam Memediasi Hubungan Belanja Modal terhadap Kemiskinan**

H4b yang menyatakan PE mampu memediasi hubungan antara BM dengan KM memperoleh hasil yang bertolak belakang. H4b tidak terdukung karena memiliki tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,124 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa PE tidak mampu memediasi hubungan antara BM dengan KM. Ketidakmampuan PE dalam memediasi hubungan antara BM dengan KM dapat disebabkan oleh pengalokasian BM tidak serta merta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sarana dan prasarana saja sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi. Belanja modal juga digunakan seperti untuk pengembangan sumber daya manusia dan modernisasi teknologi. Ada kemungkinan lain yakni, belanja modal yang memicu pembangunan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat, namun bukan dalam hal kemiskinan bisa jadi dalam hal pendidikan atau angka harapan hidup yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Ketidakmampuan PE memediasi hubungan BM dan KM juga dapat disebabkan karena peningkatan PE belum tentu memicu kegiatan produksi dan distribusi sehingga menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan. Peningkatan PE akibat alokasi BM mungkin lebih berpengaruh pada peningkatan aktivitas ekonomi lainnya, seperti konsumsi. Hal ini juga didukung adanya Covid-19 di mana pemerintah mengalihkan alokasi BM untuk menanggulangi dampak Covid-19 yang salah satunya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat (Fadhilah *et al.*, 2023).

## **Pengaruh Pandemi Covid-19 dalam Memoderasi Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran**

H5a pada penelitian ini terdukung, terbukti tingkat signifikansinya sebesar 0,016 lebih besar dari 0,05. Koefisien jalur H5a sebesar -0,087 yang berarti bahwa COV memoderasi secara negatif (melemahkan) hubungan antara PE dengan PG. PE dan PG memiliki hubungan lawan arah di mana apabila PE tinggi maka PG akan rendah. Namun sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi seharusnya mampu menurunkan angka pengangguran justru meningkatkan angka pengangguran akibat moderasi negatif Covid-19.

Dampak negatif Covid-19 yang diantaranya adalah PHK berdampak langsung terhadap peningkatan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif harusnya mampu menekan tingkat pengangguran di Indonesia, namun akibat Covid-19 hal ini tidak bisa terjadi. Pada saat Covid-19 keadaan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan, hal menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Upaya pemerintah menstabilkan ekonomi nyatanya belum berhasil menekan angka pengangguran pada saat Pandemi Covid-19.



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Pengaruh Pandemi Covid-19 dalam Memoderasi Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan**

H5b yang menyatakan moderasi COV terhadap hubungan PE dengan KM juga terdukung, hal ini terbukti dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Akan tetapi, berbeda dengan H5a yang memoderasi secara negatif, pada H5b moderasi COV terbukti positif (memperkuat) hubungan PE dengan KM karena nilai koefisien jalurnya sebesar 0,146. PE dan KM memiliki hubungan lawan arah di mana apabila PE tinggi maka KM akan rendah. Penelitian ini menemukan bahwa COV memoderasi positif atau memperkuat pengaruh keduanya. PE tinggi menurunkan angka kemiskinan, diperkuat oleh COV sehingga PE tinggi mengakibatkan KM rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, COV mampu memoderasi secara positif, ini berarti dengan adanya Covid-19 tidak memperburuk atau menaikkan kemiskinan di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena tanggapan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 ini. Dengan bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan UMKM mampu mengurangi dampak buruk Covid-19 ini. Bantuan pemerintah mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, bantuan pemerintah memungkinkan masyarakat untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga tingkat kemiskinan tertekan. Upaya pemerintah menstabilkan pertumbuhan ekonomi pada saat Pandemi Covid-19 berhasil menekan angka kemiskinan di daerah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa alokasi PAD dan DAU penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan penting diawasi pemanfaatannya karena terbukti menjadi salah satu dana yang digunakan untuk belanja modal. PAD dan DAU yang dialokasikan ke belanja modal guna menunjang aktivitas ekonomi terbukti mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, alokasi PAD dan DAU yang terdapat pada belanja modal sebaiknya lebih banyak digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang mendukung. Belanja modal dalam penelitian ini tidak memengaruhi pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Covid-19 terbukti meningkatkan pengangguran meskipun pertumbuhan ekonomi dijaga kestabilannya. Hal ini pastinya tidak terlepas dari banyaknya perusahaan yang melakukan PHK dan mengalami kebangkrutan. Terakhir, Covid-19 tidak meningkatkan kemiskinan di Indonesia secara signifikan, hal ini tidak lepas dari peran pemerintah pusat dan daerah yang gencar memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama Covid-19 berlangsung dan terus berusaha menjaga kestabilan ekonomi selama pandemi.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini direncanakan menggunakan empat tahun penelitian yakni tahun 2019-2022. Akan tetapi, masih banyak kabupaten/kota yang belum memunculkan data secara lengkap dari tahun 2019-2022 terutama tahun 2022 sehingga penelitian ini mengeliminasi cukup banyak sampel yakni 167. Sebagian besar sampel yang dieliminasi berasal dari Papua sehingga penelitian ini kurang mencerminkan keadaan di seluruh Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan pertumbuhan ekonomi untuk memediasi pengaruh belanja modal

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terhadap pengangguran dan kemiskinan saja, padahal masih banyak variabel yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang dapat dikaitkan dengan belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi.

## Saran

Penelitian seperti ini diharapkan dapat dilakukan kembali oleh peneliti selanjutnya dengan melengkapi data di tahun 2022 sehingga hasil penelitian akan lebih mencerminkan keadaan yang akurat dan general. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah daerah juga memperhatikan kelengkapan data yang di-*publish* kepada masyarakat mengingat pentingnya data tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dikaitkan dengan belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi. IPM yang merupakan ukuran komposit yang mencakup pendapatan, harapan hidup, dan tingkat pendidikan dalam suatu negara sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Oleh karena itu, belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi mungkin akan berpengaruh terhadap variabel IPM.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat memediasi belanja modal terhadap pengangguran dan kemiskinan. Belanja modal tidak mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi. Artinya pertumbuhan ekonomi yang didorong belanja modal belum bisa memengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya lebih bijak dalam mempertimbangkan alokasi belanja modal dalam APBD sehingga kebijakan yang berkaitan dengan belanja modal tersebut dapat lebih berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dan tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat terkendali.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2016). *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ardian, R., Syahputra, M., & Dermawan, D. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.
- Arianto, B. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2). <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>
- Azzahra, A., Manesanulu, A. K., Upara, T. B., & Badrudin, R. (2023). Nexus between flypaper effect and growth inclusive economy. *Jurnal Akuntansi*, 15.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Darise, N. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks Jakarta.
- Fadhilah, H. Z., Chandra, H. A., Wahyuningsih, M., & Badrudin, R. (2023). Nexus between capital expenditure and economic growth in Indonesia in the Covid-19 pandemic. 2. <https://doi.org/10.14414/jbb.v12i2.3293>
- Ghiffari, P. M., & Ariani, K. R. (2022). The effect of LGR, transfer income, capital expenditures on economic growth before and during Covid-19 pandemic.
- Goma, E. I. (2021). Dampak Covid-19 terhadap isu kependudukan di Indonesia. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 33–42. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3180>
- Gunantara, P. C., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 529–546.
- Harahap, R. D., Harahap, M. I., & Syari, M. E. (2019). Pengaruh DAU dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah sebagai variabel intervening. 5.
- Haryanto, M. L., & Suprianto, E. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai variabel moderasi pada pemerintah provinsi di Indonesia.
- Hendriwiyanto, G. (n.d.). Pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi.
- Irawan, E. (2022). The effect of unemployment, economic growth and human development index on poverty levels in Sumbawa Regency in 2012-2021. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(2), 950. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i2.5455>
- Irvan, I. P., & Karmini, N. L. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening. 5 [3], 338–362.
- Isa, D. P., Arham, M. A., & Dai, S. I. (2019). Effects of capital expenditures, development index and unemployment on poverty in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.1998>
- Jensen & Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Joy, J. N., Okafor, M. C., & Ohiorenuan, I. H. (2021). Impact of public capital expenditure on poverty rate in Nigeria. *International Journal Paper Public Review*, 2(4), 46–55. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v2i4.115>



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Kaligis, E., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan di Minahasa Utara melalui pertumbuhan ekonomi sebagai intervening variabel. 17(02).
- Lisandri, L., Rizani, F., & Syam, A. Y. (2017). Pengaruh PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. *JURNAL SPREAD*, 7.
- Luthfia & Siregar. (2016). How do governments spend their public spending? *Jurnal Economica*, Volume 12, Nomor 2.
- Maheni, M., & Maryono. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p1-17>
- Mawarni, M., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi pada kabupaten dan kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*.
- Najib Putri, R. H., & Yuliana, I. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dengan pengangguran sebagai mediasi di Probolinggo. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(6), 2691–2700. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2531>
- Priambodo, A. (2014). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2013. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14338>
- Putrayuda, T. F., Efni, Y., & Kamaliah. (2017). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya pada tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2011-2015. . . September, 3.
- Quy, N. H. (2016). Relationship between economic growth, unemployment and poverty: analysis at provincial level in Vietnam. *International Journal of Economics and Finance*, 8(12), 113. <https://doi.org/10.5539/ijef.v8n12p113>
- Salama, S. C. U. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(1). <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i1.7874>
- Salsabila Sevira Putri. (2022). Analisis pengaruh tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota DKI Jakarta tahun 2017-2021. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(1), 39–51. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i1.442>
- Sani, S. R., Fitri, C. D., Amri, K., Muliadi, M., & Ikhsan, I. (2022). Dampak pandemi Covid-19 terhadap pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan: bukti data panel di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 107. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.499>

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran: pendekatan analisis jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi sektor publik (akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Siregar, B. (2019). Direct and indirect effects of investment on community welfare. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(3), 206–216. [https://doi.org/10.21511/imfi.16\(3\).2019.19](https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.19)
- Siregar, I. G. (2022). Pengaruh DAU, DAK, PAD dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. *Dynamic Management Journal*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.31000/dmj.v6i2.7540>
- Siswiyanti, P. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p1-17>
- Subiyakto & Algifari. (2011). *Praktikum statistika dengan ms excel dan spss*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.
- Sukirno, S. (2006). *Makro ekonomi teori pengantar*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sundoro, F. M., & Suhardjo, Y. (2021). Pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi (studi empiris pada kabupaten/kota di jawa tengah). *Solusi*, 19(3), 141. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i3.4032>
- Todaro & Smith. (2008). *Pembangunan ekonomi jilid 1*. Erlangga.